**REVOLUSI MESIR 23 JULI 1952: BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN RAJA FAROUK**

Diana Trisnawati

(Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNY)

Email: diana.trisnawati@uny.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kondisi politik, sosial, dan ekonomi Mesir di bawah pemerintahan Raja Farouk, (2) mengungkapkan peran dan kontribusi gerakan *Free Officers* dan gerakan Ikhwanul Muslimin dalam menggulingkan kekuasaan Raja Farouk, (3) mengetahui proses terjadinya Revolusi Mesir 23 Juli 1952, dan (4) mengetahui kondisi Mesir pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah kritis seperti yang dijabarkan oleh Kuntowijoyo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadaan politik Mesir masa pemerintahan Raja Farouk banyak mengalami kekacauan, diantaranya sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat, dan adanya dominasi Inggris yang berperan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Terjadi ketimpangan sosial yang cukup tajam antara golongan elit yang terdiri dari tuan tanah dan pengusaha dengan petani kecil. Keadaan tersebut membuat munculnya banyak kelompok oposisi dalam masyarakat yang diwakili oleh *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin. *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin sama-sama merasa prihatin terhadap kondisi Mesir dan memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Revolusi tersebut berhasil dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Farouk di Mesir. Pasca revolusi, pemerintahan Mesir dikendalikan oleh Dewan Mangkubumi. Pada tanggal 18 Juni 1953 sistem pemerintahan monarki Mesir diganti dengan republik, sekaligus pengangkatan Muhammad Naguib sebagai presiden.

**Kata kunci: Revolusi Mesir 23 Juli 1952, Pemerintahan, Raja Farouk**

***ABSTRACT***

*This study aims to: (1) find out Egypt’s political, social, and economic conditions under King Farouk’s reign, (2) reveal the role and contribution of the movement of Free Officers and Muslim Brotherhood movement in the overthrow of King Farouk, (3) find out the process of the Egyptian Revolution of 23 July 1952, and (4) find out the condition of Egypt's post Egyptian Revolution of 23 July 1952. This study was conducted using critical historical method as described by Kuntowijoyo. the result of the study showed that Egypt’s political situation during the reign of King Farouk experienced chaos, such as frequent cabinet changes in a relatively short time and dominance of the British role in any government policy making. There were quite extreme social inequalities between the elite, consisting of landlords and employers, and small farmers. Such conditions triggered the emergence of many opposition groups in society, represented by the Free Officers and Muslim Brotherhood. These groups shared the same concerns over the condition of Egypt and gave a major contribution to the burst of the Egyptian Revolution of 23 July 1952. The revolution succeeded and put Farouk’s power in Egypt to an end. Post-revolution, Egypt's government is controlled by Dewan Mangkubumi. On June 18 1953 the system the Egyptian monarchy was replaced by a republic, as well as the appointment of Muhammad Naguib as president.*

**Keyword: *Egyptian Revolution of 23 July 1952, administration, King Farouk***

**PENDAHULUAN**

Mesir atauRepublik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara, namun apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya merupakan bagian dari Asia Barat (Philip K Hitti, 2001:236).Mesir bukan merupakan negara yang kaya, apabila dilihat dari sektor ekonominya. Perekonomian Mesir tergantung pada sektor pertanian, ekspor minyak bumi, dan pariwisata. Selain itu, lebih dari 3.000.000 jiwa orang Mesir bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa (Apriadi Tamburaka, 2002: 69). Populasi yang tumbuh pesat, keterbatasan lahan pertanian, dan ketergantungan pada Sungai Nil membuat sumber daya ekonomi Mesir melemah. Bangsa Mesir merupakan bangsa yang patuh dan mudah dipengaruhi (Peter Mansfield, 1969: 9). Jadi, tidak mengherankan apabila Inggris dengan mudah menguasai dan melakukan kolonisasi terhadap Mesir. Meskipun demikian, Mesir merupakan salah satu negara di belahan dunia Arab yang memiliki perkembangan cukup dinamis. Mesir modern sering mengalami pergulatan politik yang berkepanjangan dan bertahap. Sampai dengan tahun 2013 ini, terhitung sudah tiga kali Mesir melakukan revolusi yang didasarkan pada ketidakstabilan pemerintahan dan politik Mesir.

*Pertama*, Revolusi yang terjadi pada tahun 1919. Revolusi tersebut terkait dengan penempatan pasukan-pasukan militer Inggris di Mesir, khususnya di sekitar Terusan Suez. Pemerintahan Mesir di bawah Muhammad Ali memiliki sifat loyal terhadap Inggris. Segala kebijakan politik Mesir diputuskan oleh perwakilan Inggris yang ada di Mesir. Pada saat itu, Mesir sudah dijadikan negara boneka oleh Inggris, dan pemerintahan Mesir memiliki ketergantungan sangat besar kepada Inggris. Sa’ad Zaghlul seorang politisi muda dengan dukungan masyarakat Mesir berupaya untuk menegakkan kemerdekaan bagi Mesir. Keinginan tersebut tidak diindahkan oleh Inggris yang masih mempunyai banyak kepentingan di wilayah Mesir, terutama Terusan Suez. Revolusi 1919 memberikan pengaruh dalam berbagai aspek bagi bangsa Mesir, terutama berkaitan dengan meningkatnya identitas bangsa, dan nasionalisme (Gershoni Israel dan James P Jankowski, 1986: 270).

*Kedua,* Revolusi Mesir 23 Juli 1952 yang dimimpin oleh Gamal Abdul Nasser berusaha untuk menumbangkan kekuasaan Raja Farouk dan penguasaan Inggris di Mesir. Dominasi kekuatan yang menggerakkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952 berasal dari gerakan *Free Officers* dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Revolusi ini sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan monarki Mesir, beralih pada negara republik yang sarat akan modernisme. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 memiliki kekhasan dan dirasa cukup menarik, sehingga dipilih sebagai fokus kajian dalam artikel ini.

*Ketiga,* Revolusi yang dilakukan dalam rangka menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada tanggal 26 Januari 2011 oleh kalangan muda Mesir. Revolusi 26 Januari 2011 diawali dengan diskusi-diskusi ringan yang dilakukan oleh para pengguna jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*. Hal tersebut meningkat menjadi aksi demonstrasi besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat. Revolusi 26 Januari 2011 yang menuntut untuk diturunkannya Presiden Hosni Mubarak ini menuai keberhasilan. Keberhasilan tersebut juga harus dibayar mahal dengan banyaknya kerugian yang ditanggung oleh pemerintah Mesir pasca revolusi.

Keadaan ini tentu tidak jauh berbeda ketika Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dilakukan dalam rangka mengubah wajah politik Mesir secara radikal. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 merupakan sebuah penggulingan kekuasaan Raja Farouk oleh gerakan *Free Officers* yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser (Ira M. Lapidus, 1999:121). Pada masa awal Revolusi, Muhammad Naguib diangkat sebagai presiden, walaupun pemimpin dan konseptor yang sebenarnya adalah Gamal Abdul Nasser. Peran dan partisipasi golongan militer memang sangat besar dalam mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Golongan militer ialah mereka yang menjadi kawan seperjuangan Gamal Abdul Nasser. Selain kelompok militer, partisipasi dan dukungan bagi terwujudnya Revolusi Mesir juga datang dari kelompok agamawan di Mesir. Kelompok agamawan tersebut tergabung dalam Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Ikhwanul Muslimin memberikan banyak pengaruh baik di bidang agama dan politik di Mesir (Adeed Dawisha, 1986: 86). *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin merupakan dua kekuatan besar yang berperan dalam menggulingkan kekuasaan Raja Farouk. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Revolusi Mesir 23 Juli 1952.

**METODE PENELITIAN**

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu mengenai suatu peristiwa yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia (Kuntowijoyo, 1995:17). Penulisan artikel ini mengikuti metode sejarah yang disampaikan oleh Kuntowijoyo. Secara singkat metode tersebut memiliki 5 tahap: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi, (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 1995:17).

1. **Pemilihan Topik**

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh penulis, topik yang dipilih adalah *Revolusi Mesir 23 Juli 1952: Berakhirnya Pemerintahan Raja Farouk*.

1. **Heuristik**

Heuristik adalah suatu teknik dan seni yang dalam melakukannya membutuhkan ketrampilan (Sartono Kartodirdjo, 1992: 31). Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk menghimpun jejak-jejak masa lampau yang disebut dengan data sejarah heuristik berasal dari bahasa Yunani “heuriskein” yang berarti mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah (G.J Renier, 1997:113). Heuristik diperoleh dari sumber primer dan sekunder.

1. **Sumber Primer**

Sumber primer yang digunakan dalam artikel ini adalah buku karangan Gamal Abdul Nasser sendiri yang berjudul *The Philosophy of The Revolution* diterbitkan oleh Ministry of National Guidance Information Administration di Kota Kairo, Mesir.

**b.Sumber Sekunder**

Sumber sekunder adalah kesaksian seorang yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni seseorang yang tidak hadir pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (John W Best, Research in Education, Alih bahasa oleh Sanapiah Faisal dan Mulyani Guntur Winesa, Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.1982. hlm.39). Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, dokumen dimana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian digoreskan dalam bentuk tulisan.

1. **Kritik Sumber (Verifikasi)**

Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah sumber atau data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara substansial maupun secara fisik. Kritik sumber terdiri dari kritik intern (*kredibilitas*) dan kritik ekstern (*otentisitas*) (Kuntowijoyo, 1995:99).Tujuan kritik sumber adalah untuk memberikan penelitian terhadap validitas dan reliabilitas sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan sumber-sumber yang terkumpul.

1. **Analisis Sumber (Interpretasi)**

Sejarah bukan hanya deretan fakta dan peristiwa, tetapi merupakan interpretasi yang dilakukan para penulisnya (Nourouzzaman Shaddiqi, 1984:1). Interpretasi (penafsiran) adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya,atau juga digunakan untuk menafsiran fakta-fakta telah didapat yang kemudian menganalisa sumber yang pada akhirya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data diperoleh (Kuntowijoyo, 1995:100). Penafsiran data-data, diperoleh berdasarkan kekuatan analisis yang diperkuat melalui kajian pustaka dan segi peninjauan yang terkait dengan Revolusi Juli 1952.

1. **Historiografi (Penulisan Sejarah)**

Historiografi merupakan sebuah kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Tahap penyajian ini merupakan tahap akhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta kedalam bentuk tulisan. Sejarawan sebenarnya mempunyai tanggung jawab sosial yang besar karena tidak hanya bicara tentang isu-isu nasional, melainkan harus mempunyai wawasan jauh ke depan (Kuntowijoyo, 1994:17). Penulis menggunakan sumber-sumber tertulis yang terkait dengan Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dalam penyusunan artikel ini.

**PEMBAHASAN**

Mesir banyak mengalami pergolakan politik sebelum revolusi. Pemerintahan Mesir di bawah Raja Farouk mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang. Tidak adanya pembatasan kekuasaan raja, membuat raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal tersebut yang membuat masyarakat Mesir tidak lagi memuji dan mengagumi sosok Raja Farouk. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan. Penyimpangan tersebut salah satunya ditandai dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh kalangan bangsawan, kriminaitas, dan ketidakadilan membuat kekecewaan dikalangan kelompok-kelompok masyarakat. Korupsi merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Raja Farouk. Raja Farouk memiliki aset yang beragam, uang, dan lahan yang luas. Perlu diketahui, sebenarnya perilaku korupsi di Mesir mulai ada sejak penguasaan Muhammad Ali Pasha 1765. Sampai pada saat Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dicetuskan, topik yang paling hangat dibicarakan adalah tentang korupsi.

Adanya kemerosotan di berbagai bidang terkait dengan pemerintahan Raja Farouk di Mesir, menimbulkan oposisi di kalangan masyarakat. Muncul kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Raja Farouk, baik yang memiliki latar belakang agama maupun nasionalis. Kubu-kubu masyarakat anti pemerintahan Raja Farouk dan dominasi Inggris terus berkembang dan melaju untuk mencari dukungan dari masyarakat secara lebih luas. Pada mulanya mereka bergerak secara bebas tanpa mengenal misi dari masing-masing kelompok. Namun, pada akhirnya mereka menyatukan kekuatan di bawah tujuan yang sama, yakni menggulingkan kekuasaan Raja Farouk di Mesir.

Secara umum, masyarakat Mesir sudah merasa muak dengan pejabat-pejabat pemerintahan yang pro dengan bangsa asing. Perang Dunia II juga memberikan dampak yang cukup berarti bagi Mesir. Salah satu dampak dari Perang Dunia II adalah mengibarkan nama Inggris di Mesir dan semakin memperparah keadaan Mesir. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Mesir. Harga jual kapas menurun, pendapatan per kapita merosot, dan kriminalitas merajalela.

….hampir separuh dari tanah pertanian di negara Mesir dikuasai oleh hanya sekitar 12.400 tuan tanah. Selebihnya 2.282.000 petani, menguasai sekitar sepertiganya saja. Kebanyakan menjadi buruh tani yang hidup ibarat budak. Sementara hanya sebagian kecil orang Mesir asli (pribumi Mesir) yang bergerak di bidang industri, perdagangan, dan menjadi kaum intelektual. Di tahun 1936, pendapatan perkapita rata-rata hanya 50 dollar per tahun. Tingkat buta huruf mencapai 90% (Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan,1981:12).

Situasi kemerosotan sosial dan ekonomi di Mesir semakin diperparah dengan banyaknya pengangguran tenaga kerja produktif Mesir. Lapangan kerja yang terbatas, dan kaum imigram dari wilayah pedesaan yang berpindah ke Kairo tidak mendapatkan pekerjaan. Terjadinya ketimpangan sosial di Mesir bukan merupakan satu-satunya faktor kemerosotan bagi Mesir, namun keadaan tersebut menjadi semakin kacau mengingat Inggris masih melakukan kolonisasi terhadap Mesir. Kondisi tersebut tentu mengundang perhatian masyarakat Mesir untuk segera berbenah diri. Sebelum adanya perebutan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Mesir 23 Juli 1952, Mesir merupakan sebuah negara yang bersifat semi feodal. Tuan tanah dan kerajaan merupakan pemilik lahan pertanian yang dominan di Mesir. Terdapat kesenjangan sosial yang tajam dalam masyarakat Mesir. Tuan tanah dan pengusaha kaya menikmati hidup dengan bergelimang harta, sementara petani miskin hanya memperoleh upah sedikit dari hasil jerih payah mereka.

Hampir di segala bidang kehidupan Mesir mengalami degradasi yang cukup signifikan. Keadaan *chaos* tersebut menimbulkan banyaknya kerusuhan dalam masyarakat Mesir yang berupa penjarahan, perampokan, dan perselisihan antar kelompok. Banyaknya tuntutan perubahan yang harus dilakukan oleh Mesir, membuat Gamal Abdul Nasser dan pengikutnya berpikir lebih dalam. Melalui kemampuannya, Gamal Abdul Nasser berusaha melakukan koordinasi dan menemukan jawaban atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Mesir secara hati-hati tanpa menyakiti pihak lain (Charles D Cremeans, 1963:29). Sementara itu, gerakan anti Inggris terus berkembang pesat dan mengalami kemajuan. Gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok anti Inggris tersebut mulai tampak bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia II tahun 1939. Masalah Palestina yang merupakan inti dan dasar sengketa Arab-Israel adalah sengketa atas Palestina antara penduduk Arab dan penduduk Yahudi-nya yang keduanya merasa berhak atas negeri itu dan berusaha untuk menguasainya dan mengembangkan kehidupan nasionalnya (Kirdi Dipoyudo, 1977:82).

Situasi dan keadaan di Mesir yang bergejolak menimbulkan banyak oposisi-oposisi atau kelompok baik yang pro dengan pemerintah maupun anti pemerintah. Kelompok militer Mesir juga memiliki keterwakilan kekuatan dalam menyikapi gejolak kemerosotan di negaranya. Pertentangan-pertentangan yang terjadi di kalangan militer kemudian menjadikan sebuah kekuatan untuk bergerak maju. Kelompok militer juga memulai debutnya melalui pembicaraan-pembicaraan singkat dan diskusi ringan di markas tentara. Diskusi-diskusi sederhana tersebutlah yang kemudian melahirkan sebuah gagasan dibentuknya suatu perkumpulan para perwira militer Mesir. Gamal Abdul Nasser muncul sebagai pencetus ide badan rahasia yang diberi nama *Free Officers* tersebut. Selain Gamal Abdul Nasser, ada beberapa tokoh yang memiliki andil cukup besar di dalam badan tersebut. Mereka berasal dari kelompok yang sama, yakni kalangan militer yang merupakan teman seperjuangan Gamal Abdul Nasser. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Kamaluddin Hussein, Abdul Hakim Amir, Hasan Ibrahim, Abdul Moniem, Abdul Rauf, Salah Salim, Jamal Salim, Abdul Latief Baghdadi, Khalid Moheiddin, dan Anwar Sadat (Hamdan Basyar, M, 1998:86).

Selain kalangan militer, oposisi juga muncul dari kelompok yang menjunjung tinggi syari’at dan ajaran Islam di Mesir. Kelompok tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Ikhwanul Muslimin. Peranan Ikhwanul Muslimin di Mesir menyentuh berbagai bidang yakni sosial, pendidikan, dan keagamaan. Meskipun pada awalnya Ikhwanul Muslimin hanya semacam perkumpulan orang-orang untuk berdiskusi, tapi pada perkembangannya Ikhwanul Muslimin memiliki banyak pengikut dan cabang di berbagai tempat. Pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna merupakan lulusan dari Darul Ulum pada tahun 1972. Dia merupakan seorang guru sekolah Ibtidaiyah sejak 20 September 1927 (Ali Muhammad Garishah, 1988:12). Sekolah tersebut terletak di Kota Ismailliyah. Di sekolah tersebut, ia mengampu mata pelajaran Bahasa Arab.

Jalinan kerjasama yang erat antara *Free Officers* dengan Ikhwanul Muslimin mulai terbentuk sejak pecahnya Perang Palestina 1948. Kedua kelompok tersebut merasa pentingnya dilakukan kerjasama untuk menggulingkan pemerintahan Raja Farouk. Dalam Perang Palestina 1948, baik *Free Officers* maupun Ikhwanul Muslimin ikut berpartisipasi dalam melawan zionisme Israel. Jauh sebelum pemerintah Mesir menyatakan perang terhadap zionisme, *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin sudah turun tangan terlebih dahulu. Antara *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin memang sudah terjalin ikatan emosional yang sangat kuat. Hal itu dibuktikan ketika berita terbunuhnya Hasan Al-Banna sampai di garis depan (saat Perang Palestina 1948), banyak sekali anggota *Free Officers* yang datang secara sembunyi-sembunyi ke kemah Ikhwanul Muslimin untuk menyampaikan belasungkawa (Ali Muhammad Garishah, 1988:167). Sikap solidaritas dan hubungan persaudaraan antara *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin tidak hanya dibuktikan dalam hal tersebut saja.

Seperti halnya *Free Officers*, Ikhwanul Muslimin sangat menolak adanya pendudukan Inggris yang sudah sangat mengakar di Mesir. Alasan Ikhwanul Muslimin menentang adanya pendudukan Inggris lebih cenderung kepada pengaruh sekularisme yang ditanamkan Inggris untuk Mesir. Ikhwanul Muslimin memiliki misi yang sejati, yakni ingin mewujudkan pemerintahan Mesir yang bernafaskan Islami. Hubungan erat antara *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin terus berlanjut hingga pecahnya Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Antara *Free Officers* dan Ikhwanul Muslimin memiliki andil yang cukup besar dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya tidak semua anggota Ikhwanul Muslimin turut serta berperan dalam Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Hudaibi, sebagai pemimpin Ikhwanul Muslimin pasca terbunuhnya Hasan Al-Banna memilih mengasingkan diri saat revolusi berlangsung hingga akhir pemerintahan Raja Farouk, namun sejarah tetap mencatat bagian Ikhwanul Muslimin dalam Revolusi Mesir 23 Juli 1952 (Ali Muhammad Garishah, 1988:170).

Semangat Revolusi Mesir 23 Juli 1952 tercermin dari dukungan yang diberikan oleh rakyat Mesir terhadap perjuangan Gamal Abdul Nasser dan rekan-rekannya. Masyarakat sudah jenuh dengan pemerintahan Raja Farouk yang otoriter dan tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Para mahasiswa Universitas Al-Azhar yang dulunya sangat mendukung kepemimpinan Raja Farouk, beralih haluan menjadi pembela *Free Officers*. Mereka turut serta dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Mesir. Pada awalnya *Free Officers* bermaksud melaksanakan rencana mereka sekitar tahun 1954 atau 1955 (Peter Mansfield, 1991:242), namun setelah mengetahui keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang mengalami degradasi, rencana tersebut dipikirkan kembali.

Selain itu, pada tanggal 26 Januari 1952 terjadi peristiwa pertumpahan darah yang lebih dikenal dengan “Black Saturday” (Peter Mansfield, 1991:242). *Free Officers* bukan hanya mahir dalam bidang militer, mereka juga sebagai pengamat sosial dan ekonomi Mesir. *Free Officers* tampil sebagai pahlawan yang selama ini dinantikan oleh masyarakat Mesir untuk membawa perubahan. Rencana Revolusi Mesir 23 Juli 1952 sebenarnya sudah dipikirkan sejak lama oleh *Free Officers*. Rencana pemberontakan untuk menghancurkan pemerintahan Raja Farouk yang diwarnai dengan korupsi dan dominasi asing tersebut perlu dipikirkan dengan matang. Untuk mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengayomi dan memberikan dukungan penuh bagi terlaksananya revolusi tersebut (Peter Mansfield, 1991:243). Para anggota *Free Officers* merasa bahwa Gamal Abdul Nasser lah yang paling tepat untuk memimpin Revolusi Mesir 23 Juli 1952, karena memiliki wawasan dan pandai dalam mengatur strategi pertahanan militer. Gamal Abdul Nasser tampil menjadi pemimpin revolusi tersebut karena dirasa paling sesuai dan mampu untuk mengemban amanah *Free Officers*. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 disambut oleh rakyat dan tentara karena dengan demikian telah tersingkirkan pimpinan yang tidak mendapatkan kepercayaan di bawah Raja Farouk yang merupakan seorang boneka Inggris (John L Esposito, 1985:185)

Setelah melihat keadaan yang semakin tak menentu, awalnya komite menetapkan tanggal 22 Juli 1952 sebagai awal revolusi. Namun, ternyata prediksi tersebut kurang tepat. Revolusi justru memuncak pada tanggal 23 Juli 1952. Semboyan para penggerak Revolusi Mesir 23 Juli 1952 adalah tekad dan keberanian. Waktu yang ditetapkan tengah malam, setelah seluruh rancangan garis besar operasi dibuat oleh Gamal Abdul Nasser. Adapun tahap yang direncanakan dalam serangan antara lain menangkap penguasa militer, menangkap penguasa sipil, dan menurunkan raja dari singgasananya (Hamdan Basyar, M, 1998:243). Pada hari Rabu, 23 Juli 1952 pergolakan antara kalangan tentara yang pro dengan *Free Officers* kembali terjadi. Kali ini pergolakan lebih dahsyat dan memakan banyak korban, baik dari pihak Raja Farouk maupun *Free Officers*. Radio Kairo sendiri telah sebanyak 2 kali menyuarakan secara resmi adanya *coup d’etat* di Mesir. Muhammad Naguib telah menyampaikan bahwa rakyat memilih dengan pilihannya sendiri. Tank-tank dan kesatuan-kesatuan berlapis baja pada Hari Rabu 23 Juli 1952 mengadakan gerak patroli di jalan-jalan besar Kairo.

Pertempuran yang terjadi di Kairo tersebut meletus setelah kesatuan-kesatuan artileri bertindak terhadap pasukan-pasukan pengawal Raja Farouk di Istana Abdin. Pada tanggal 23 Juli 1952 terjadi demonstrasi besar-besaran dan pertumpahan darah antara kalangan tentara militer. Muhammad Naguib beserta rombongannya memberikan tuntutan kepada Raja Farouk untuk segera mengubah pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Mesir, yakni tentang pemberian hak-hak prerogatif Raja untuk memecat pemerintah dan membubarkan parlemen. Dengan hak-hak prerogatif raja tersebut, maka apabila sesuatu pemerintah (kabinet) yang jalan politiknya tidak sesuai dengan kehendak raja dapat dibubarkan dan diganti oleh kabinet yang baru.

Penjagaan terhadap Mesir dari kelompok Raja Farouk pun diperketat. Tentara Mesir telah menempatkan pasukan-pasukan penjagaan yang kuat di sekitar gedung-gedung penting, dan kesatuan tank-tank ditempatkan di wilayah yang strategis. Gedung-gedung penting tersebut diantaranya Istana Abdin, Istana Ras at-Tin, Koubbeh di Kairo, dan Montazah di Iskandaria. Situasi seperti itulah yang membuat kondisi Mesir semakin memanas. Pasukan tentara Mesir yang dimotori oleh *Free Officers* berhadapan langsung dengan pengawal-pengawal Raja Farouk. Selain itu, pesawat pem-bom juga sudah berkeliling di atas Kota Kairo.

Setelah Farouk turun tahta, kemudian digantikan oleh putranya, Ahmad Fuad. Raja Mesir yang masih bayi tersebut tidak dapat menjalankan roda pemerintahan seperti pemimpin pada umumnya. Kemudian dibentuklah Dewan Mangkubumi yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan Mesir, sambil menunggu Raja Ahmad Fuad tumbuh dewasa. Perubahan status pemerintahan monarki ke republik baru dilakukan kurang lebih 1 tahun setelah meletusnya Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Dewan Mangkubumi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bekas *Free Officers* yang kemudian mengubah nama menjadi *Revolutionary Command Council* (Peter Mansfield, 1991:244). Dewan sementara ini bertahan sampai dengan Juni 1953.

Pada tanggal 18 Juni 1953, *Revolutionary Command Council* mengumumkan penghapusan sistem monarki Mesir menjadi sebuah negara republik (Peter Mansfield, 1991:244). Berkaitan dengan berdirinya Republik Mesir yang baru tersebut, segera diangkatlah presiden sebagai kepala negara. Pemerintah Mesir memang tidak banyak melakukan pertimbangan mengenai pengangkatan Muhammad Naguib sebagai presiden, namun sebenarnya Gamal Abdul Nasser lah yang memiliki ide tersebut. Pencalonan tunggal Muhammad Naguib sebagai presiden pertama Mesir tidak banyak mendapat protes dari masyarakat Mesir, karena Muhammad Naguib terkenal dengan loyalitas dan tanggung jawabnya dalam *Free Officers*. Selain itu, Muhammad Naguib telah lebih dari 1 kali menjabat sebagai perdana menteri di Mesir. Gamal Abdul Nasser yang terkenal dengan semangat nasionalismenya justru tidak mencalonkan dirinya sendiri sebagai presiden Mesir. Hal itu telah banyak dipertimbangkan oleh Gamal Abdul Nasser, karena masyarakat Mesir kurang suka dengan pemimpin yang masih muda.

Meskipun jabatan presiden ada di tangan Muhammad Naguib, namun kekuasaan Gamal Abdul Nasser tampak lebih dominan dalam cabinet (Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan,1981:15). Muhammad Naguib menjadi presiden sekaligus merangkap sebagai menteri dalam negeri, sedangkan Gamal Abdul Nasser menjadi Sekretaris Jenderal *Liberation Rally* (Ishak Mussa Al Husaini, 1983: 178). Selain itu, para anggota *Revolutionary Command Council* juga banyak yang duduk di pemerintahan Mesir. Pemerintahan republik yang baru lebih banyak memberikan responnya terhadap politik dan perekonomian Mesir. Memang, dalam dekade pertama pemerintahan Mesir tidak mengambil tindakan yang mengganggu kepentingan orang kaya, pengusaha industri, dan perdagangan (Eric A Nordlinger, 1991:268). Pemerintahan Mesir justru meningkatkan kepentingannya dengan menghapus oligarki tradisional, melemahkan kelompok politik sayap kiri, dan menghapus serikat kerja.

Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sama-sama memiliki kepentingan dalam pemerintahan Mesir. Sering terjadi perselisihan pendapat di antara keduanya, namun perselisihan tersebut dapat diredamkan. Ketika menghadapi permasalahan terkait dengan Ikhwanul Muslimin, keduanya juga memiliki pandangan yang berbeda. Muhammad Naguib menilai bahwa peristiwa 28 Maret 1954 merupakan kudeta kedua, setelah kudeta 23 Juli 1952 yang lebih dikenal dengan sebutan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Muhammad Naguib tidak bisa mengendalikan keadaan, sehingga Gamal Abdul Nasser harus tampil ke depan mengepalai sebuah pemerintahan militer untuk meredakan konflik.

Konflik antara Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sebenarnya sudah dimulai sejak proses peralihan pemerintahan monarki ke republik. Pada saat itu, Muhammad Naguib sebagai presiden terpilih ingin langsung mengadakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan mengembalikan pemerintahan negara ke tangan sipil. Namun, Gamal Abdul Nasser berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah memulihkan keadaan sosial dan ekonomi yang hancur pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952 terlebih dahulu, kemudian barulah dilaksanakan pemilu. Ketegangan antara Gamal Abdul Nasser dan Muhammad Naguib semakin memanas. Gamal Abdul Nasser yang berusia jauh lebih muda kini tidak segan-segan untuk menegur atau menekan Muhammad Naguib sebagai presiden. Pemilu yang sejak terbentuknya republik sudah diidam-idamkan oleh Muhammad Naguib akhirnya terlaksana. Pemilu dilaksanakan pada bulan Juni 1956. Dalam pemilu tersebut, akhirnya Gamal Abdul Nasser terpilih sebagai presiden menggantikan Muhammad Naguib. Selanjutnya, Gamal Abdul Nasser tampil sebagai penguasa *defacto* Mesir pada tanggal 18 Juni 1956 (Alan R Taylor, 1990:47).

**PENUTUP**

Mesir dihadapkan dengan kekacauan politik yang disebabkan oleh seringnya pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat. Kabinet yang tidak sesuai dengan keinginan raja, dengan mudah dibubarkan dan menggantinya dengan yang baru. Partai Wafd sebagai partai terbesar di Mesir tidak dapat menyalurkan aspirasi rakyatnya, dan cenderung membela kepentingan pemerintah. Kondisi Mesir yang cukup memprihatinkan tersebut membuat munculnya berbagai kelompok oposisi dalam masyarakat Mesir. Kekuatan paling dominan diwakili oleh kelompok militer Mesir yang tergabung dalam gerakan *Free Officers*. *Free Officers* merasa prihatin terhadap kemunduran yang terjadi di Mesir, dan berencana mengadakan perubahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berawal dari diskusi-diskusi ringan para perwira militer, kemudian muncullah suatu tekad untuk mengadakan revolusi yang lebih dikenal dengan sebutan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Gamal Abdul Nasser merupakan pencetus ide sekaligus penggerak *Free Officers* dalam mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952.

Puncak revolusi tersebut terjadi pada tanggal 23 Juli 1952 dan berlangsung selama 4 hari. Raja Farouk memilih turun tahta dan meninggalkan Mesir pada tanggal 26 Juli 1952. Raja Farouk beserta keluarga pergi ke Italia dengan menggunakan kapal pesiar mewah. Kedatangan Raja Farouk disambut baik oleh pemerintahan Italia, dan Raja Farouk diperkenankan tinggal untuk sementara waktu. Pasca pengunduran diri Farouk, pemerintahan Mesir dikendalikan oleh Dewan Mangkubumi yang didominasi oleh anggota *Free Officers*. Dewan Mangkubumi menjalankan pemerintahan sampai dengan tahun 1953.

Pemerintahan monarki dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik internasional. Gamal Abdul Nasser dan rekan-rekannya menilai bahwa pemerintahan monarki hanya akan menciptakan penyelewengan seperti yang dilakukan oleh Farouk. Selain itu, masyarakat Mesir menginginkan bentuk negara yang lebih demokratis dan memihak pada kepentingan rakyatnya. Sistem pemerintahan republik yang demokratis kemudian menjadi pilihan bagi penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Gamal Abdul Nasser yang selama ini tampil sebagai pemimpin tidak langsung menjabat sebagai presiden Mesir. Muhammad Naguib lah yang tampil sebagai presiden pertama Mesir atas inisiatif dari Gamal Abdul Nasser. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Mesir tidak suka dengan pemimpin yang masih muda. Pada saat itu, Gamal Abdul Nasser baru berusia 35 tahun.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dewan redaksi Jurnal Istoria terbitan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan sehingga tulisan ini dapat dipublikasikan pada edisi Maret 2016.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alexander, Anne. (2005). *Nasser: His Live and Time*. London: Haus Publishing Limited.

Ali Muhammad Garishah. (1988). *Dakwah&Sang Dai: Kharisma Hasan Al Banna.* Jakarta: Gema Insani Press.

Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan. (1981). *Anwar Sadat: Di Tengah Teror dan Damai.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Apriadi Tamburaka. (2002). Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah. Yogyakarta: Narasi.

Best, John W. Research in Education. Alih bahasa oleh: Sanapiah Faisal dan Mulyani Guntur Winesa. (1982). *Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Cremeans, Charles D. (1963). *The Arabs and The World: Nasser’s Arab Nationalist Policy.* New York: Council On Foreign Relations By Frederick A Preager.

Dawisha, Adeed. (1989). *Islam in Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Esposito, John. Islam and Development Religion and Sosiopolitical Change. Alih bahasa oleh S H S. (1985). *Agama dan Perubahan Sosiopolitik*. Aksara Persada Press.

Gershoni Israel, dan Jankowski, James P. (1986). *Egypt, Islam, and The Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930.* Oxford: Oxford University Press.

Harun Nasution. (1975). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hitti, Philip K. (2001). *Sejarah Ringkas Dunia Arab*. Yogyakarta: Iqra’ Pustaka.

Ishak Mussa Al Husaini. (1983). *Ikhwanul Muslimun: Tinjauan Sejarah Sebuah Gerakan Islam (Bawah Tanah)*. Jakarta: Grafiti Pers.

Kirdi Dipoyudo. (1977). *Timur Tengah dalam Pergolakan.* Jakarta: Yayasan Proklamasi.

Lapidus, Ira M. A History of Islamic Societies. Alih bahasa oleh: Ghufron A. Mas’adi. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

\_\_\_\_\_\_\_*.* (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.

Mansfield, Peter. (1969). *Nasser’s Egypt*. Harmondsworth: Penguin Books.

\_\_\_\_\_\_\_. (1991). *A History of The Middle East*. Harmondsworth: Penguin Books.

Nourouzzaman Shaddiqi. (1984). *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis.* Yogyakarta: PLP2M.

Nordlinger, Eric A. (1990). *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Renier, G.J. A History its Purpose and Method. Alih bahasa oleh Muin Umar. (1997). *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.* Jakarta : Gramedia.

Taylor, Alan R. The Arab Balance of Power. Alih bahasa oleh Abubakar Basyarahil. (1982). *Pergeseran-pergeseran Aliansi dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab.* Jakarta: Amar Press.

Hamdan Basyar, M. (1998). “Bagaimana Militer Menguasai Mesir”, *Jurnal Ilmu Politik 3*. Jakarta: Gramedia.

“Pertempuran Meletus di Cairo Sekitar Coup D’etat di Mesir”. *Suara Masjarakat*, Jumat 25 Juli 1952. Malang.

“Farouk Turun Tachta dan Tinggalkan Mesir”. *Suara Masjarakat,* Senin 28 Juli 1952.

Malang.